

ABSTRAK

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 dinilai tidak mengindahkan prinsip keadilan dan persamaan dihadapan hukum, dimana Mahkamah Konstitusi hanya melarang salah satu tempat, yaitu (tempat ibadah) sementara itu dengan memperbolehkan instansi pemerintahan dan lembaga pendidikan menimbulkan dampak yang tidak adil dan tidak menerapkan persamaan dihadapan hukum. Berangkat dari hal tersebut, maka terdapat dua permasalahan, yaitu Bagaimana pertimbangan Hakim Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait dengan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum yang menggunakan Fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat Pendidikan, dan Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap netralitas Pendidikan Politik Bagi Masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 65/PUU-XXI/2023 mengabulkan tempat ibadah untuk tidak digunakan sebagai tempat kampanye Pemilihan Umum dengan alasan pertimbangan hakim pentingnya menghormati sensitivitas dan nilai-nilai budaya, agama dan kebebasan beragama dalam kampanye Pemilihan Umum. Tempat ibadah memiliki makna dan nilai-nilai spritual yang tinggi. Mengenai fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan mahkamah konstitusi mempertimbangkan untuk tetap digunakan selama ada izin dari pihak penanggung jawab serta tidak memakai atribut kampanye pemilihan umum. kemudian adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 ini dapat dipastikan dampak yang akan terjadi baik dalam instansi pemerintahan maupun lembaga pendidikan yang didalamnya terdapat seorang Aparatur Sipil Negara, yaitu akan berimplikasi pada netralitas dari pada Aparatur Sipil Negara itu sendiri, selain itu dipastikan pihak yang bertanggung jawab akan ada konflik kepentingan yang tidak bisa membedakan antara kepentingan atas nama pribadi dan kepentingan atas nama lembaga baik itu dalam pemerintahan maupun dilingkungan pendidikan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Persamaan dihadapan Hukum dan Kampanye Pemilihan Umum.

ABSTRACT

The existence of the Constitutional Court Decision number 65/PUU-XXI/2023 is considered not to heed the principles of justice and equality before the law, where the Constitutional Court only prohibits one place, namely (a place of worship) while allowing government agencies and educational institutions to cause an unfair impact and do not apply equality before the law. Departing from this, there are two problems, namely how the Constitutional Judge considered in decision Number 65/PUU-XXI/2023 related to the implementation of the General Election campaign using government facilities, places of worship and places of education, and how the impact of the Constitutional Court's decision Number 65/PUU-XXI/2023 on the neutrality of Political Education for the Community.

This research uses normative research methods, with a legislative approach and a conceptual approach.

The results of this study show that the Constitutional Court in deciding case number 65/PUU-XXI/2023 granted a place of worship not to be used as a place for the General Election campaign on the grounds that the judge considered the importance of respecting the sensitivity and values of culture, religion and freedom of religion in the General Election campaign. Places of worship have high meaning and spiritual values. Regarding government facilities and educational places, the constitutional court considers continuing to use them as long as there is permission from the person in charge and does not use the attributes of the general election campaign. then the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 can be ascertained that the impact will occur both in government agencies and educational institutions, including a State Civil Apparatus, that is, it will have implications for the neutrality of the State Civil Apparatus itself, in addition to that it is certain that the responsible party will have a conflict of interest that cannot distinguish between interests on behalf of individuals and interests on behalf of institutions, both in the government and in the educational environment.

Keywords: Constitutional Court, Equality before Law and Campaign Election.